
Pendidikan Moderasi Beragama di Indonesia (Wacana dan Kebijakan)

M Mukhibat

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia
mukhibat@iainponorogo.ac.id

Ainul Nurhayati Istiqomah

Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia
ainulnurhayati24@gmail.com

Nurul Hidayah

Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia
hidayahn998@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.21154/sajiem.v4i1.133
--

Abstract

Currently there are many social conflicts that arise due to differences in religion and belief. Therefore it is important for government agencies to make a breakthrough program to deal with these situations and conditions. One of the programs that has been implemented is the religious moderation program that has been echoed by the Indonesian Ministry of Religion since 2016. This research aims to dig deeper regarding the religious moderation policy in Indonesia that has been implemented by the Indonesian Ministry of Religion, especially in the field of education. By using the literature study research method, the results of the research show that as a multicultural country, Indonesia has a variety of ethnicities, cultures and religions, so that this diversity has the potential to create conflict between ethnic, cultural and even religious groups. Therefore, mainstreaming religious moderation appears as an alternative to establishing peace between people in diversity. Religious moderation education policies are carried out in the framework of maintaining inter-religious harmony in Indonesia with the main objective of reducing intolerance, religious fanaticism and extremism that can threaten social stability and national security. In the context of globalization and technological advances, religious moderation education can help students understand the role of religion in modern life and how to develop positive values from religion.

Keywords: *education policy, religious moderation*

Abstrak

Saat ini banyak terjadi berbagai konflik sosial yang muncul karena perbedaan agama dan keyakinan. Oleh sebab itu penting bagi instansi pemerintahan untuk membuat suatu terobosan program guna menangani situasi dan kondisi tersebut. Salah satu program yang sudah dijalankan adalah program moderasi beragama yang digaungkan oleh Kementerian Agama RI

sejak tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam terkait kebijakan moderasi beragama di Indonesia yang sudah dijalankan oleh Kementerian Agama RI utamanya dalam bidang pendidikan. Dengan menggunakan metode penelitian studi literatur, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai negara multikultural, Indonesia mempunyai berbagai ragam suku, budaya, dan agama, sehingga keragaman ini berpotensi memunculkan konflik antar kelompok suku, budaya, bahkan agama. Oleh karena itu, pengarusutamaan moderasi beragama muncul sebagai alternatif menjalin perdamaian antar manusia di dalam keragaman. Kebijakan pendidikan moderasi beragama dilakukan dalam rangka menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia dengan tujuan utama mengurangi intoleransi, fanatisme agama, dan ekstremisme yang dapat mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional. Dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi, pendidikan moderasi beragama dapat membantu peserta didik untuk memahami peran agama dalam kehidupan modern dan bagaimana cara mengembangkan nilai-nilai positif dari agama.

Kata kunci: kebijakan pendidikan; moderasi beragama

Copyright © 2023 M. Mukhibat, Ainul Nurhayati Istiqomah, Nurul Hidayah.
Southeast Asian Journal of Islamic Education Management
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Indonesia menjadi salah satu negara dengan keanekaragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama yang besar, yang tiada tandingannya di dunia. Adanya fakta beragamnya masyarakat Indonesia ini, memunculkan konsekuensi betapa beragam pula pendapat, pandangan, keyakinan, dan berbagai kepentingan setiap individu di masyarakat. Berbagai upaya dilakukan sebagai antisipasi perpecahan akibat keragaman ini. Salah satunya adanya bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia di Indonesia yang dapat menjadi sarana komunikasi dari masyarakat dengan berbagai keyakinan yang berbeda, sehingga antar individu dalam masyarakat dapat saling memahami satu sama lain. Walaupun terkadang, adanya kekeliruan dalam pengelolaan keragaman menjadi celah adanya suatu permasalahan.¹

Keberagaman adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan ini. Keberagaman dalam beragama adalah *sunnatullah* sehingga keberadaannya tidak bisa dinafikan begitu saja. Selain itu, dalam menghadapi masyarakat majemuk, senjata yang paling ampuh untuk mengatur agar tidak terjadi radikalisme atau bentrok antar kelompok adalah dengan adanya pendidikan Islam yang moderat dan inklusif.²

Implementasi pendidikan Islam yang moderat dan inklusif mulai digaungkan oleh berbagai lembaga pemerintahan di Indonesia untuk mewujudkan jaminan pemenuhan hak beragama dan hak sipil dalam program dan layanan publik yang inklusif, salah satunya Kementerian Agama Republik Indonesia. Di mana moderasi beragama adalah program yang sudah di mulai sejak tahun 2016 oleh Menteri Agama Republik Indonesia pada saat itu yaitu Lukman Hakim Syaifudin. Moderasi beragama dipercaya dapat menjadi salah satu solusi guna

¹ Ni Wayan Apriani dan Ni Komang Aryani, "Moderasi Beragama," *Kalangwan Jurnal Pendidikan Agama, Bahasa dan Sastra* 12, no. 1 (31 Maret 2022): 34-45, <https://doi.org/10.25078/kalangwan.v12i1.737>.

² Ahmad Zainur Fahri Mohamad, "Moderasi Beragama di Indonesia," *Religions* 13, no. 5 (2022): 451, <https://doi.org/10.3390/rel13050451>.

menata kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk. Selain itu, untuk memaksimalkan program Moderasi Beragama, juga dibentuk kelompok kerja (pokja) Moderasi Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 720 Tahun 2020 dan ditandatangani oleh Menteri Agama RI Fachrul Razi dengan masa jabatan 2019-2020. Pokja tersebut dibentuk sebagai tindak lanjut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 sebagai rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2020-2024, yang mana Kementerian Agama RI dipercaya sebagai *leading sector* dalam penerapan program Penguatan Moderasi Beragama.³

Tahun 2019 merupakan tahun yang ditetapkan Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai "Tahun Moderasi Beragama". Moderasi beragama dijadikan tema besar dalam berbagai program dan kebijakan yang dibuat. Dalam pelaksanaan setiap kegiatannya, lembaga ini selalu berusaha untuk menempatkan diri sebagai lembaga moderasi atau penengah dalam berbagai keberagaman dan desakan arus disrupsi yang berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan beragama.

Moderasi beragama merupakan suatu konsep guna menjaga kerukunan umat beragama. Konsep tersebut tidak hanya bertujuan untuk memoderasikan agama, akan tetapi untuk memoderasikan cara mengetahui dan menerapkan ajaran agama dalam situasi di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk. Hal tersebut sebagaimana penelitian terdahulu⁴ yang menyatakan bahwa melalui Kementerian Agama Republik Indonesia kegiatan moderasi beragama dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian bangsa dan negara untuk mengatasi problematika radikalisme dan terorisme yang terjadi di Indonesia. Kegiatan moderasi beragama yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sangat membantu setiap orang, kelompok, lembaga bangsa dan Negara untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan serta pengalaman tentang sikap-sikap Moderat.

Adanya hal tersebut menjadikan moderasi beragama bagian penting dari RPJMN 2020-2024, adanya penetapan moderasi beragama menjadikan arah kebijakan negara yang jelas dalam rangka membentuk karakter sumber daya manusia Indonesia yang moderat, yaitu sumber daya manusia yang berpedoman kuat pada hakikat ajaran dan nilai agama, mengutamakan kepentingan umum, serta menjunjung tinggi komitmen kebangsaan. Oleh sebab itu adanya penguatan moderasi beragama menjadi salah satu langkah strategis pencapaian visi Indonesia maju.

Secara konstitusional, penguatan moderasi beragama juga memiliki landasan hukum yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 yang menerangkan bahwa terdapat kewajiban negara untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya. Selain itu, perlindungan terkait kebebasan beragama juga tercantum dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kewajiban negara untuk melindungi kebebasan beragama secara khusus menjadi tugas Kementerian Agama. Hal tersebut sesuai dengan Perpres Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama yang menyatakan bahwa Kementerian Agama memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang agama untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintah

³ Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI, *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020).

⁴ Sumarto Sumarto, "Implementasi Program Moderasi Beragama Kementerian Agama RI," *Jurnal Pendidikan Guru* 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.47783/jurpendigu.v3i1.294>.

negara.

Moderasi beragama tidak hanya difokuskan dalam lingkup masyarakat saja, akan tetapi juga dalam lembaga pendidikan. Hal tersebut dapat diketahui melalui lima strategi utama penguatan moderasi beragama salah satunya yaitu penguatan sistem pendidikan dengan sudut pandang moderasi beragama, yang mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan penerimaan tenaga pendidik.⁵ Selain itu, dalam implementasinya guna untuk memperkuat program moderasi beragama dalam lembaga pendidikan, *stakeholder* atau jajaran Kementerian Agama juga melakukan kajian terhadap bahan ajar atau kurikulum yang berkaitan dengan moderasi beragama di lembaga pendidikan agama, pendidikan keagamaan, dan di institusi pendidikan tinggi negeri. Hal tersebut dikarenakan lembaga pendidikan dipercaya sebagai salah satu cara yang efektif guna melaksanakan sebuah perubahan sosial. Oleh karenanya penguatan moderasi beragama dalam kurikulum pendidikan harus mendapatkan perhatian utama.

Kebijakan pengarusutamaan pendidikan moderasi beragama merujuk pada upaya untuk mempromosikan pendidikan yang menghargai perbedaan agama dan keyakinan serta mendorong sikap toleransi dan saling menghormati di antara para pelajar dan masyarakat. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memperkuat persatuan nasional dan mengurangi konflik sosial yang mungkin muncul karena perbedaan agama dan keyakinan. Hal tersebut sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh W. Hefni⁶ bahwa moderasi beragama didiskusikan, dilafalkan, diejawantahkan, dan digaungkan sebagai framing dalam pengelolaan kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultural. Adanya hal tersebut tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut terkait bagaimana kebijakan moderasi beragama di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen terkait topik penelitian yang sedang dijalankan.⁷ Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil-hasil penelitian terdahulu yang sudah dipublikasikan melalui penelaah atas referensi yang relevan, utamanya terkait kebijakan pemerintah tentang pendidikan moderasi beragama.⁸

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *literer* yaitu teknik pengumpulan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan pustaka yang sesuai dengan objek pembahasan yang diteliti. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah melalui tiga cara yaitu editing, pengorganisasian, dan penemuan hasil penelitian. Kemudian untuk analisis data menggunakan analisis isi, yaitu suatu analisis yang dilakukan dengan cara mempelajari tidak langsung terkait perilaku manusia melalui analisis komunikasi.

⁵ RI, *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024*.

⁶ W Hefni, "Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri," *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (2020).

⁷ Patton author. Michael Quinn, *Qualitative research & evaluation methods : integrating theory and practice* (SAGE Publications Ltd STM, 2015).

⁸ Juliet Corbin & Anselm Strauss, "Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory," *Canadian Journal of University Continuing Education* 36, no. 2 (2010): 463-65.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Moderasi Beragama: Urgensi, Prinsip dan Manifestasi dalam Konteks Bernegara

Belakangan ini tema-tema tentang moderasi beragama kian menggaung di kalangan para sarjana muslim. Khususnya di Indonesia, moderasi beragama menjadi kajian menarik untuk didiskusikan. Tren moderasi beragama dipicu meningkatnya aksi-aksi anarkis, brutal, dan terorisme yang dilakukan oleh kelompok radikal-ekstrim dengan menggunakan nama Islam. Beberapa studi juga menyebut meningkatnya diskursus tentang moderasi beragama berkorelasi dengan fenomena radikal-ekstrimis dan juga terorisme, bahkan studi lain menunjukkan keterkaitan antara kelompok salafi Jihadi ekstrim dengan serangkaian aksi teror di tanah air.⁹

Keragaman yang dimiliki oleh bangsa ini merupakan salah satu alasan urgensi diluncurkannya moderasi beragama. Lukman Hakim Saifudin menyebut ada tiga alasan mendasar mengapa bangsa ini membutuhkan moderasi beragama. *Pertama*, Agama hadir dengan misi kedamaian dan keselamatan untuk menjunjung nilai kemanusiaan. *Kedua*, fanatisme golongan disebabkan atas penafsiran teks-teks agama memicu konflik agama dan itu harus dihindari. *Ketiga*, khususnya di Negara Indonesia, moderasi agama disebut sebagai sebuah strategi untuk membangun peradapan. Kedua alasan tersebut jika ditarik garis besarnya menyebutkan agama sebagai *world view* yang bergantung atas pemahaman keagamaan.¹⁰ Sumber utama pemahaman keagamaan adalah interpretasi teks-teks agama. Maka terhadap wilayah ini moderasi agama hendak membongkar doktrin ekstrim yang tekstualis. Atas beberapa alasan di atas, dan dengan memperhatikan kondisi keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia, maka moderasi beragama adalah keniscayaan bagi bangsa ini.

Berbagai kajian terdahulu dinyatakan bahwa moderasi beragama bermula dari konsep *wasathiyat Islam*.¹¹ Pengertian ini membawa pemahaman pada *the middle path* Islam, yang berarti Islam memiliki fungsi menyeimbangkan atau sebagai mediator. Pada konteks ini, keadilan (*al 'adl*) dan keseimbangan (*tawazun*) menjadi penting untuk menghindarkan umat Islam dari terjebak pada dua kutub ekstrim, kanan dan kiri, fundamentalis dan liberalis dan lain sebagainya. *Ahlussunnah wal Jamaah* adalah kelompok Islam yang menganut konsep moderasi ini dengan mengedepankan prinsip *tawazun* (seimbang), *tasamuh* (toleran) dan *tawasuth*.¹² Ismail Raji Al Faruqi mengelaborasi keseimbangan sebagai sikap menghindari diri dari dua kutub ekstrim sekaligus mencari titik temu. Moderasi beragama menghendaki keseimbangan dalam keyakinan yang diekspresikan oleh individu maupun kelompok agama.¹³ Watak dasar Islam adalah moderat, karena Islam adalah moderasi dalam arti karakteristik ajarannya. Setiap pandangan, keyakinan, cara berfikir dan keterikatan antara umat, mereka harus melakukan ini.¹⁴

Moderasi beragama menghendaki dan meniscayakan umat beragama untuk tidak

⁹ U Khoiriyah dan S. N Fatah, "Pendidikan moderasi dalam membangun toleransi antarumat beragama," *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 1 (2021): 16-29.

¹⁰ Noblana Adib, "Kebijakan Tentang Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Non-Formal: Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT) Tahun 2011-2015," *SUSTAINABLE: Jurnal Kajian Mutu Pendidikan* 2, no. 1 (2019): 23-45, <https://doi.org/10.32923/kjimp.v2i1.980>.

¹¹ Adib.

¹² Ma'arif NU, *Moderasi Beragama dalam Pendidikan* (Jakarta: Dewan Pendidikan Pusat, 2018).

¹³ Martinis Yamin Mukhta, *10 Kiat Sukses Mengajar di kelas, Cet-3* (Jakarta: PT. Nimas Multima, 2007).

¹⁴ Najelaa Shihab, *Semua Murid Semua Guru Edukasi di masa Pandemi* (Tangerang Selatan: Literati, 2020).

eksklusif namun sebaliknya mereka harus inklusif (terbuka), mampu berbaur, menyesuaikan diri dengan berbagai komunitas, menghormati perbedaan, dan juga saling belajar untuk melengkapi.¹⁵ Sehingga dengan hal tersebut, moderasi beragama dapat memotivasi setiap individu beragama agar menghindari sikap ekstrim serta berlebihan dalam menyikapi keragaman. Termasuk dalam hal ini adanya keragaman penafsiran atas teks agama, keragaman doktrin agama, keragaman keyakinan dan lain sebagainya. Bersamaan dengan itu, umat beragama harus memiliki sikap adil dan seimbang karena sejatinya setiap individu secara bersama harus mampu hidup berdampingan dalam suatu konsensus.

Ketika dikaji dan dikaitkan dengan tradisi agama, moderasi agama tidak hanya diperbincangkan oleh Islam sendiri. Diskursus moderasi bukan hanya klaim Islam saja melainkan semua agama. Ekstrimisme, fundamentalisme, terorisme bukan hanya mengancam pada Islam, tetapi menjadi ancaman berbagai agama. Dalam konteks Indonesia semua agama yang hidup di negara ini mengalami penyesuaian dengan atmosfer kebangsaan. Tantangan yang dihadapi oleh semua agama adalah sama, yakni penafsiran atas doktrin agama yang tertulis pada teks suci masing-masing agama. Maka dinamika yang diinginkan terjadi adalah kontekstualisasi ideologi masing-masing agama kemudian mengakar menjadi bagian dari masyarakat multikultur Indonesia.¹⁶

Sebagai manifestasi moderasi beragama di Indonesia, maka seluruh umat beragama perlu memiliki komitmen kebangsaan yang kuat. Hal ini dilakukan guna mengetahui seberapa besar cara pandang dan gagasan seorang ataupun sekelompok pemeluk agama terhadap ideologi kebangsaan, utamanya adalah penerimaan terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya adalah bagaimana praktik toleransi yang dilakukan oleh umat beragama dapat berjalan dengan baik. Umat beragama perlu memberi ruang dan tidak mengganggu praktik keyakinan umat lain. Bersamaan dengan itu mereka menerima keragaman dan berperan aktif merawat keragaman juga bagian dari toleransi yang dibutuhkan bangsa ini. Sikap toleransi ini akan membawa umat beragama pada satu visi untuk tidak menerima berbagai bentuk kekerasan serta tindakan radikal. Serta yang tidak kalah penting adalah bagaimana umat beragama perlu menjadi akomodatif terhadap budaya lokal. Agama tidak berdiri dan lahir dari ruang hampa, ia juga berbaur dengan budaya.

Negara Indonesia dalam mewujudkan arah moderasi beragama melakukan salah satu strategi yang dibangun oleh Kementerian Agama yaitu pelebagaan moderasi beragama.¹⁷ Dalam konteks ini adalah melalui saluran pendidikan dan khususnya pendidikan Tinggi Islam.¹⁸ Ketika moderasi beragama dilembagakan maka jelas akan membutuhkan manajemen strategi implementasinya, baik pada aspek perencanaannya, pelaksanaannya, dan evaluasi pendidikan moderasinya.

Sebenarnya konsep *wasathiyah* dalam pendidikan tercermin dalam praktik pendidikan Islam klasik Indonesia, sebut saja pesantren. Pengajaran kitab kuning sebagai bentuk tanggung

¹⁵ Sumarto, "Implementasi Program Moderasi Beragama Kementerian Agama Ri."

¹⁶ D Suryani, *Pendidikan multikultural: Modul pembelajaran toleransi agama dan budaya* (Jakarta: Kencana, 2019).

¹⁷ Sumarto, "Implementasi Program Moderasi Beragama Kementerian Agama Ri."

¹⁸ Adib, "Kebijakan Tentang Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Non-Formal: Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT) Tahun 2011-2015."

jawab keilmuan sekaligus sebagai pembentuk pola pikir masyarakat untuk bersikap moderat.¹⁹ Hal ini ketika dilihat dari perspektif Sabaa Mahmud akan nampak titik singgungnya. Pesantren dikenal sebagai basis pendidikan Islam bercorak tradisional. Dalam pandangannya, kaum tradisional meskipun berpegang teguh pada teks agama dan doktrin yang kuat, tetapi mereka masih mau menerima pikiran terbuka dalam hal ini penafsiran teks agama pada saatnya akan membawa mereka kepada arah moderatisme. Konsep pesantren – paradigma tradisional inilah yang hari ini kemudian diduplikasi pendidikan tinggi untuk melembagakan moderasi beragama.²⁰ Meskipun pada dasarnya, pendidikan tinggi lebih memiliki modal dasar perspektif ilmiah dalam mengkaji keilmuan apapun jenis dan bidangnya.

Moderasi Beragama di Indonesia (Wacana dan Kebijakan)

Kementerian agama RI memiliki sejarah yang panjang, dulu bernama Departemen Agama dan ini berkaitan dengan masa pendudukan dalam kebijakan Jepang yang menjajah Indonesia selama tiga setengah tahun (1942-1945). Kementrian Agama berdiri pada 3 Januari 1946 atas desakan partai-partai politik Islam. Jepang memberi wadah aspirasi keagamaan bagi orang muslim di Indonesia dengan membentuk kantor urusan agama yang dulu disebut sebagai “*Shumubu*” dan Majelis Syuro Muslimin (*Masyumi*). Dalam implementasinya, Kementerian Agama memberikan batasan tertentu terkait kebebasan beragama dengan membuat arti agama, dengan tujuan memberikan pengetahuan penting terkait kebebasan beragama. Sehingga makna daripada yang disebut “agama” berbeda-beda tergantung dalam tradisi kepercayaan yang berbeda dan pandangan masing-masing etnis²¹

Tujuh program wajib yang disiapkan pada Rakernas Kemenag 2021 dan Rakernas 2022 adalah: *Pertama*, Penguatan Moderasi Beragama (dilaksanakan secara internal oleh Kemenag dan masyarakat); *Kedua*, transformasi digital (untuk layanan publik dan kinerja aparatur); *Ketiga*, kebangkitan kembali KUA (KUA sebagai jendela ibadah di berbagai bidang kehidupan); *Keempat*, *Cyber Cyber Islamic University* (menawarkan kesempatan pendidikan yang setara); *Kelima*, kemandirian pondok pesantren (pesantren harus memiliki sumber daya keuangan yang berkelanjutan untuk memenuhi tugas-tugas pendidikan, dakwah dan penguatan masyarakat); *Keenam*, Indeks Agama (sebagai indikator untuk menjadikan Indonesia sebagai barometer kualitas Islam Ukhuwah, Wathoniyah dan Basyariah); dan ketujuh, Deklarasi Tahun Toleransi 2022 (2022 adalah Tahun Toleransi, sehingga Indeks Kerukunan/Toleransi harus meningkat).

Penguatan moderasi beragama menjadi program nomor pertama di antara tujuh program mandatori yang telah disimpulkan dalam rakernas Kementrian Agama Tahun 2021 dan Rakernas Tahun 2022. Dengan demikian, adanya penguatan moderasi beragama sangat penting dan menjadi asas utama dalam membangun relasi sosial yang harmonis di tengah

¹⁹ Azza Alburaidi dan Abdullah Ambusaidi, “The impact of using activities based on the Montessori approach in science in the academic achievement of fourth grade students,” *International Journal of Instruction* 12, no. 2 (April 2019): 659–708, <https://doi.org/10.29333/iji.2019.12244a>.

²⁰ M Ramli, “Pendidikan karakter moderasi beragama sebagai solusi radikalisme di perguruan tinggi,” dalam *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* (Sumatera Utara, 2018), 97–105.

²¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama, Kalangwan Jurnal Pendidikan Agama, Bahasa dan Sastra*, vol. 12, 2022, <https://doi.org/10.25078/kalangwan.v12i1.737>.

masyarakat Indonesia.²² Adanya program mandatori tersebut, maka moderasi beragama perlu diperhatikan dengan serius. Karena jika diumumkan dan disosialisasikan tanpa adanya pemikiran yang matang, akan mengakibatkan adanya perbedaan dan ketidaksiharasan antar komponen, etnis, keyakinan, pola pikir (mindset), pola sikap, dan tindakan kehidupan sosial kebangsaan ini. Sehingga, penting adanya pencermatan dan evaluasi terhadap pelaksanaan moderasi beragama.

Adanya kesepakatan bersama terkait penguatan moderasi beragama yang merupakan salah satu kebijakan negara dengan tujuan untuk menciptakan sistem kehidupan beragama dan bernegara yang serasi, harmonis, damai, dan toleran. Dengan latar belakang masyarakat Indonesia yang majemuk dan keragaman agama, suku, budaya, dan kepercayaan yang berbeda-beda perlu adanya penguatan moderasi beragama. Karena pada dasarnya keberagaman agama menuntut munculnya berbagai interpretasi. Jika tidak dikelola dengan baik, keragaman penjelasan agama yang sulit dimengerti dapat menimbulkan ketegangan atau konflik antar umat beragama maupun antara umat beragama dengan pemerintah.

Komitmen berbangsa dan bernegara adalah sikap penting yang harus ada dalam diri individu atau kelompok masyarakat di Indonesia. Dengan memiliki komitmen ini, seseorang atau kelompok masyarakat bersedia menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Hal ini tercermin dalam nilai-nilai dan prinsip dasar negara seperti keberagaman, persatuan, kerakyatan, supremasi hukum, dan kesejahteraan sosial. Komitmen berbangsa dan bernegara di Indonesia tercermin dalam beberapa hal seperti Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan pendidikan. Pancasila menjadi pedoman dalam tindakan dan kebijakan pemerintah serta menjadi landasan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. UUD 1945 memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan kebijakan dan tindakan pemerintah dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan tentang keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Sedangkan pendidikan menjadi sarana penting dalam membangun komitmen berbangsa dan bernegara, generasi muda diajarkan nilai-nilai kebangsaan dan diberikan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab sebagai warga negara.²³

Program moderasi beragama sudah mulai diluncurkan sejak tahun 2016 oleh Menteri Agama RI pada saat itu yaitu Lukman Hakim Saifuddin. Program ini diharapkan menjadi penyelesaian masalah tatanan kehidupan beragama masyarakat Indonesia yang beragam. Sehingga dengan adanya hal tersebut dapat mewujudkan kehidupan sosial, keagamaan, dan kebangsaan yang harmonis, damai, dan toleran. Era kemajuan teknologi yang sangat pesat ini, harus di manfaatkan sebagai wadah pembelajaran yang baik untuk generasi yang akan datang dengan menyuguhkan konten-konten keagamaan yang menyejukkan dan mendamaikan untuk menjaga keutuhan NKRI. Oleh karena itu Kementerian Agama RI membuat portal website resmi Kepustakaan Agama dengan bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional RI. Dengan di bentuknya website ini, di diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menghadapi problematika informasi dan teknologi yang mempengaruhi psikososial masyarakat, pendidik, dan anak

²² Jamaluddin Jamaluddin, "Implementasi Moderasi Beragama di Tengah Multikulturalitas Indonesia (Analisis Kebijakan Implementatif pada Kementerian Agama)," *AS-SALAM Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2022): 1-13.

²³ Y Fitria dan R Saputra, "Pendidikan Multikultural dalam Mewujudkan Moderasi Beragama di Sekolah," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 1 (2018): 19-29.

didik.²⁴ Guna mencapai kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama dengan kedamaian, pemerintah telah mengambil beberapa langkah strategis, yakni:

1. Perhatian dari pemerintah terhadap moderasi beragama menjadi penting untuk diperhatikan, utamanya yang berkaitan dengan pembuatan narasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), hal tersebut sebagai pembuktian pemerintah dalam menggemakan moderasi beragama di kalangan umat beragama di Indonesia .
2. Adanya pelibatan lembaga pendidikan, seperti pesantren, madrasah dan sekolah , sampai perguruan tinggi. Baik itu lembaga non formal lainnya guna untuk memperkuat nilai kemanusiaan, nilai kerukunan beragama, dan moderasi beragama.
3. Adanya pengembangan literasi keagamaan (*religious literacy*) dan pendidikan lintas iman (*interfaith education*).
4. Lembaga pendidikan harus memperbanyak praktik pengalaman keagamaan yang berbeda sehingga akan terjalin kerjasama antar pemeluk agama.²⁵

Jenjang perguruan tinggi, pemerintah membuat kebijakan untuk menjadikan perguruan tinggi sebagai sarana penanaman pendidikan multikultural pada maha peserta didik, oleh karenanya pendidikan multikultural di jadikan sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. Dan juga sesuai dengan surat edaran Dirjen Pendis nomor 3663, maka di dirikan Rumah Moderasi Beragama sebagai acuan perguruan tinggi dalam melakukan pelembagaan moderasi beragama di kampus.²⁶

Berdasarkan kebijakan tersebut di atas, maka kaitannya dengan sudut pandang moderasi beragama, negara menempatkan diri "*in between*". Yang berarti bahwa tidak diperbolehkan terlalu mencampuri urusan agama, tetapi juga tidak diperbolehkan terlalu renggang dari agama. Negara tidak akan mengabaikan agama, tetapi akan mendasarkan konstitusinya pada orientasi nilai-nilai agama yang mendasar, sehingga salah satu tugasnya adalah mewujudkan kebaikan bersama ke arah perdamaian dan kebahagiaan.

Ekosistem Pendidikan Moderasi Beragama

Indonesia umpama sebuah bangunan kokok yang ditunjang oleh berbagai unsur dan pilar yang kuat. Sehingga jika dihubungkan dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adanya hal memperkuat moderasi beragama merupakan tanggung jawab bersama. Pencapaian tujuannya tidak dapat dicapai dengan sendiri, akan tetapi sangat tergantung pada hubungan yang saling menguntungkan dan komprehensif dari berbagai bagian tatanan agama dan pemerintahan. Moderasi beragama tidak dapat mencapai tujuannya yaitu menciptakan kerukunan jika hanya dilakukan oleh individu atau lembaga tertentu. Moderasi beragama dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain untuk membentuk suatu sistem yang utuh.

Ekosistem pendidikan moderasi beragama mengacu pada pemahaman bahwa pendidikan adalah suatu sistem yang kompleks dan saling terkait, seperti halnya ekosistem alam. Seperti halnya dalam ekosistem alam, dalam ekosistem pendidikan terdapat berbagai

²⁴ Sumarto, "Implementasi Program Moderasi Beragama Kementerian Agama Ri."

²⁵ N Hasyim dan R Hartati, "Pembentukan klub moderasi sebagai sarana pendidikan karakter siswa di sekolah," *Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling* 4, no. 1 (2019): 57-62.

²⁶ Usfiyatul Marfu'ah dkk., "Institusionalisasi Nilai Toleransi Di Perguruan Tinggi; Refleksi Atas Rumah Moderasi," dalam *Prosiding Mukhtar Pemikiran Dosen Pmii*, vol. 1, 2021, 249-58.

elemen yang saling mempengaruhi satu sama lain. Elemen-elemen dalam ekosistem pendidikan meliputi peserta didik, guru, kurikulum, metode pengajaran, lingkungan belajar, kebijakan pendidikan, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Seperti halnya dalam ekosistem alam, perubahan atau ketidakseimbangan dalam salah satu elemen tersebut dapat mempengaruhi keseimbangan dan kinerja keseluruhan sistem.²⁷ Oleh karena itu, konsep ekosistem pendidikan menekankan pentingnya kerja sama dan kolaborasi antara semua elemen dalam sistem pendidikan guna pencapaian tujuan pendidikan yang lebih baik. Pendekatan ini mengutamakan pembelajaran dari ekosistem pendidikan dan mengakui bahwa setiap individu memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda.²⁸

Ekosistem pendidikan moderasi beragama merujuk pada suatu kondisi di mana keberagaman agama dan keyakinan dapat dihargai dan diterima oleh semua pihak dalam suatu masyarakat atau negara, tanpa adanya diskriminasi atau konflik yang merugikan pihak-pihak yang berbeda keyakinan. Ekosistem moderasi beragama dibangun melalui berbagai usaha yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, organisasi keagamaan, dan masyarakat, dengan tujuan menciptakan suatu lingkungan yang kondusif bagi praktik keagamaan yang damai dan harmonis²⁹. Dengan mengadopsi konsep ekosistem pendidikan, lembaga pendidikan akan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, berpusat pada peserta didik, dan berfokus pada pengembangan potensi individu secara holistik. Hal ini dapat membantu menciptakan generasi yang lebih siap dan kompeten dalam menghadapi tantangan masa depan.

Guna untuk menciptakan ekosistem moderasi beragama, terdapat beberapa komponen atau elemen yang sangat penting untuk dipertimbangkan. *Pertama*, keadilan dan kesetaraan harus ditegakkan oleh pemerintah dan masyarakat agar semua individu memiliki hak yang sama untuk beragama atau tidak beragama, serta adanya kesamaan kesepakatan untuk mendapatkan akses pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas publik tanpa diskriminasi. *Kedua*, toleransi antarumat beragama atau antar keyakinan menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem moderasi beragama. Semua pihak harus menghargai dan menghormati perbedaan yang ada serta tidak melakukan tindakan diskriminatif terhadap pihak yang berbeda keyakinan. *Ketiga*, komunikasi yang baik antara umat beragama sangat penting dalam mengatasi perbedaan dan mencegah terjadinya konflik yang merugikan semua pihak. *Keempat*, pendidikan yang berkualitas dan inklusif dapat memperkuat toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan dalam masyarakat. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan kondusif bagi keberlangsungan hidup masyarakat yang heterogen. *Kelima*, kepemimpinan yang moderasi sangat dibutuhkan di berbagai bidang seperti politik, sosial, agama, dan ekonomi. Pemimpin perlu mendorong kesetaraan dan toleransi dalam tindakan dan ucapan mereka, sehingga dapat memberikan contoh bagi masyarakat. *Keenam*,

²⁷ Atika Wijaya, Moh. Solehatul Mustofa, dan Fadly Husain, "Sosialisasi Program Merdeka Belajar dan Guru Penggerak Bagi Guru SMPN 2 Kabupaten Maros," *Jurnal Puruhita* 2, no. 1 (2020): 46-50, <https://doi.org/10.15294/puruhita.v2i1.42325>.

²⁸ S Hasanah dan W. P Sari, "Evaluasi pembelajaran agama Islam berbasis moderasi beragama di sekolah Dasar Negeri 14 Sawah Besar," *Jurnal Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2021): 35-46.

²⁹ Khoiriyah dan Fatah, "Pendidikan moderasi dalam membangun toleransi antarumat beragama."

kerja sama antar lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan institusi pemerintah dapat membantu memperkuat ekosistem moderasi beragama dengan cara mempromosikan kerjasama dalam berbagai kegiatan.³⁰ Semua upaya ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem moderasi beragama yang kondusif bagi keberlangsungan hidup masyarakat yang heterogen, di mana semua umat beragama dapat menjalankan kehidupan yang harmonis dan damai .

Ekosistem moderasi beragama dibutuhkan karena keberagaman agama atau keyakinan merupakan sebuah realitas yang ada dalam kehidupan masyarakat. Tanpa adanya ekosistem moderasi beragama, perbedaan keyakinan dapat menjadi sumber konflik, ketegangan, dan kekerasan di dalam masyarakat.³¹ Selain itu, ketidakadilan dan diskriminasi terhadap minoritas agama atau keyakinan yang berbeda juga dapat terjadi. Oleh karena itu, ekosistem moderasi beragama diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi semua umat beragama atau keyakinan untuk hidup berdampingan secara harmonis dan damai. Dalam ekosistem ini, setiap individu memiliki hak yang sama untuk beragama atau tidak beragama, serta adanya kesempatan yang sama dalam pemerolehan akses pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas publik tanpa diskriminasi.

Kaitannya dengan ekosistem moderasi beragama, toleransi, komunikasi, pendidikan, kepemimpinan yang moderasi, dan kerja sama menjadi elemen penting yang membantu masyarakat menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan serta mencegah terjadinya konflik antarumat beragama atau antarkeyakinan. Dengan demikian, ekosistem moderasi beragama akan membantu masyarakat memperkuat kesatuan dan persatuan dalam keragaman, serta menciptakan kedamaian dan keadilan bagi semua pihak.

Pendidikan Moderasi Beragama

Sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024, adanya peran besar moderasi beragama menjadi tujuan suatu negara dalam rangka pengupayaan strategis untuk memperkuat kerukunan umat beragama dan membangun kerukunan sosial antar masyarakat. Upaya penguatan moderasi beragama tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian saja, melainkan harus bersinergis dengan berbagai program dan kegiatan kementerian atau lembaga terkait lainnya.

Oleh karena itu, sesuai amanat RPJMN 2020-2024, Kementerian Agama merupakan sektor utama yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penguatan moderasi beragama. Akan tetapi, setiap kementerian atau lembaga lain juga harus mengimplementasikan penguatan moderasi beragama dalam kehidupan beragama dilembaganya dengan melibatkan seluruh stakeholdernya. Hal tersebut guna menjamin terwujudnya hak beragama dan sipil dalam program pelayanan publik yang inklusif.

Salah satu variabel penting suksesnya kebijakan moderasi beragama adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan menjadi wadah tumbuhnya pemikiran kebangsaan dan penanaman nilai-nilai multikulturalisme, serta memberikan pemaknaan agama dengan perdamaian. Lembaga pendidikan menjadi sarana penyebaran sensitivitas peserta didik pada

³⁰ S Ahmad, "Integrating religious moderation in school curriculum: A case study of Islamic education in Malaysia," *Journal of Education and Learning* 7, no. 1 (2018): 48-57.

³¹ Khoiriyah dan Fatah, "Pendidikan moderasi dalam membangun toleransi antarumat beragama."

ragam perbedaan yang tepat dan pengenalan ruang dialog antara pendidik dan peserta didik. Pendidik memberikan penjelasan terkait agama yang akan membawa makna perdamaian bukan kebencian, dan sistem di sekolah harus terbuka pada perbedaan tersebut.³²

Pendidikan moderasi beragama sendiri merupakan suatu pendekatan dalam pendidikan agama yang bertujuan untuk menghasilkan individu yang toleran, mampu berdialog, menghargai keberagaman, dan mampu menjaga kedamaian dan keamanan di dalam masyarakat yang beragam keyakinan.³³ Pendidikan moderasi beragama diharapkan dapat membantu mengatasi berbagai konflik yang berkaitan dengan perbedaan agama dan keyakinan, sehingga akan mewujudkan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan damai.

Pendidikan moderasi beragama dapat dilakukan di berbagai lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Kurikulum pendidikan moderasi beragama biasanya meliputi pemahaman tentang konsep moderasi beragama, keberagaman agama dan keyakinan, etika beragama, dan praktik dialog antar umat beragama³⁴. Selain itu, pendidikan moderasi beragama juga dapat diterapkan dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan keagamaan, pertemuan antar umat beragama, dan kegiatan sosial untuk meningkatkan pemahaman dan pengalaman dalam berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda agama dan keyakinan.³⁵

Pendidikan moderasi beragama juga harus didukung oleh pemerintah dan berbagai lembaga terkait untuk memastikan implementasi yang efektif dan terintegrasi. Selain itu, pendidikan moderasi beragama juga harus terus diperbarui sesuai dengan perkembangan masyarakat dan dinamika global yang semakin kompleks. Dengan demikian, pendidikan moderasi beragama diharapkan dapat menjadi bagian yang penting dalam membangun masyarakat yang toleran dan damai. Hal ini dikarenakan pendidikan diyakini akan membantu mengajarkan nilai-nilai yang mendorong kerja sama dan saling pengertian antar individu, serta mempromosikan kesadaran akan keberagaman dan perlunya menghargai perbedaan.

Lingkungan pendidikan, akan mengajarkan peserta didik untuk memahami perbedaan agama dan kepercayaan secara objektif, serta diajarkan cara menghormati dan menghargai perbedaan tersebut. Hal ini membantu peserta didik memahami bahwa semua agama dan kepercayaan memiliki nilai-nilai yang sama-sama penting dan patut dihormati, dan mendorong peserta didik untuk melihat perbedaan sebagai suatu kekayaan yang harus dijaga dan dihargai.³⁶ Selain itu, lingkungan pendidikan juga akan memastikan bahwa peserta didik memperoleh pemahaman yang baik tentang nilai-nilai agama dan kepercayaan, serta menghargai perbedaan. Lingkungan pendidikan yang positif dan inklusif dapat membantu membangun masyarakat yang lebih toleran dan damai, dan mendorong kehidupan yang

³² Edy Sutrisno, "Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan," *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 2 (2019): 323-48, <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113>.

³³ Miftahur Rohman, Muhammad Akmansyah, dan Mukhibat Mukhibat, "Mainstreaming Strategies of Religious Moderation in Madrasah," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 22, no. 1 (2022): 95-118, <https://doi.org/10.21154/altahrir.v22i1.3806>.

³⁴ Ahmad, "Integrating religious moderation in school curriculum: A case study of Islamic education in Malaysia."

³⁵ R Purwati dan E Sulistiawati, "Mengoptimalkan kerukunan antarumat beragama melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah," *Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2020): 53-68.

³⁶ Hasanah dan Sari, "Evaluasi pembelajaran agama Islam berbasis moderasi beragama di sekolah Dasar Negeri 14 Sawah Besar."

sejahtera bagi semua warga negara.³⁷

Pendidikan moderasi dapat diimplementasikan melalui berbagai cara yang disesuaikan dengan konteks dan lingkungan di mana pendidikan dilakukan. Beberapa cara yang umum dilakukan adalah menciptakan lingkungan inklusif dan ramah terhadap perbedaan, memperkenalkan nilai-nilai agama dan kepercayaan secara obyektif, membantu peserta didik memahami perbedaan agama, mendorong dialog dan diskusi terbuka, dan memperkenalkan praktik keagamaan secara inklusif. Kurikulum dan metode pengajaran yang sesuai dengan prinsip moderasi beragama juga harus diperhatikan. Pemerintah dan lembaga terkait harus mendukung implementasi pendidikan moderasi untuk memastikan efektivitas dan integrasi dalam berbagai aspek pendidikan. Dengan melaksanakan pendidikan moderasi secara tepat, akan dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, toleran, dan menghargai perbedaan agama dan kepercayaan. Hal ini dapat membantu peserta didik menjadi individu yang lebih terbuka, toleran, dan menghargai perbedaan dalam masyarakat yang semakin majemuk.³⁸

Langkah-langkah pendidikan moderasi dalam lembaga pendidikan dapat dilaksanakan dengan berbagai cara. Diantaranya dengan memasukkan pendidikan moderasi dalam kurikulum.³⁹ Sekolah dapat menekankan nilai-nilai toleransi, persatuan, dan kerukunan antarumat beragama dalam pengajaran mata pelajaran agama. Selain itu, lembaga pendidikan juga dapat membentuk klub moderasi yang bertujuan untuk memperdalam pengetahuan tentang moderasi, mempraktikkan nilai-nilai moderasi, dan mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat memupuk semangat toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Selain itu, sekolah dapat mengadakan kegiatan-kegiatan seperti seminar, dialog, dan pertemuan antarumat beragama untuk memupuk semangat toleransi dan mengajarkan siswa-siswi tentang pentingnya kerukunan antarumat beragama.⁴⁰

Untuk memastikan keberhasilan implementasi pendidikan moderasi, lembaga pendidikan membentuk tim kerukunan antarumat beragama yang bertugas untuk memonitor kegiatan-kegiatan di lembaga pendidikan, menyelesaikan konflik antarumat beragama, dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang memupuk semangat toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah pendidikan moderasi, peserta didik dapat memahami dan menginternalisasi nilai yang terdapat dalam moderasi beragama, sehingga dapat menjadikan individu yang toleran, menghargai perbedaan, dan mampu hidup harmonis dengan sesama.⁴¹

Adapun untuk mengetahui keberhasilan dari pendidikan moderasi beragama, dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui pengamatan langsung, tes dan penilaian, kuesioner atau survei, dan diskusi kelompok. Pengamatan langsung dilakukan oleh guru atau pengajar terhadap siswa selama proses pembelajaran atau kegiatan ekstrakurikuler untuk memperhatikan apakah siswa menunjukkan sikap toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan kerukunan antarumat beragama. Tes dan penilaian dapat dilakukan terkait dengan

³⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Panduan Penguatan Pendidikan Karakter Tahun 2019* (Jakarta: Kemendikbud, 2019).

³⁸ Sutrisno, "Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan."

³⁹ Rohman, Akmansyah, dan Mukhibat, "Mainstreaming Strategies of Religious Moderation in Madrasah."

⁴⁰ Hasyim dan Hartati, "Pembentukan klub moderasi sebagai sarana pendidikan karakter siswa di sekolah."

⁴¹ Jamaluddin, "Implementasi Moderasi Beragama di Tengah Multikulturalitas Indonesia (Analisis Kebijakan Implementatif pada Kementerian Agama)."

pembelajaran moderasi beragama, baik berupa tes tertulis maupun penugasan terkait, yang meliputi pemahaman siswa tentang nilai-nilai moderasi, sikap toleransi, dan tindakan konkret yang diambil siswa untuk menerapkan nilai-nilai moderasi dalam kehidupan sehari-hari.⁴² Kuesioner atau survei dapat digunakan untuk mengevaluasi persepsi siswa terhadap pembelajaran moderasi beragama dengan menanyakan pemahaman siswa tentang nilai-nilai moderasi, sikap toleransi, dan pengalaman siswa dalam menghadapi situasi yang memerlukan sikap moderasi. Diskusi kelompok dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam menerapkan nilai-nilai moderasi dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagi pengalaman dan memberikan masukan satu sama lain. Penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek dalam melakukan evaluasi, seperti efektivitas metode pembelajaran yang digunakan, tingkat pemahaman siswa, dan kemampuan siswa dalam menerapkan nilai-nilai moderasi. Dengan evaluasi yang baik, lembaga pendidikan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran moderasi beragama dan menciptakan generasi yang toleran dan menghargai perbedaan.

KESIMPULAN

Kebijakan moderasi beragama yang digaungkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki dampak besar dalam berbagai aspek, salah satunya dalam aspek pendidikan. Dalam lembaga pendidikan, kebijakan moderasi beragama dapat dilakukan melalui proses pembelajaran, baik di lembaga pendidikan formal maupun informal. Adanya kebijakan implementasi moderasi agama dapat membantu peserta didik memahami pentingnya toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan kerukunan antarumat beragama. Berbagai metode evaluasi dapat dilakukan untuk memastikan efektivitas pembelajaran, termasuk pengamatan langsung, tes dan penilaian, kuesioner atau survei, serta diskusi kelompok. Dengan demikian kebijakan moderasi beragama merupakan langkah penting dan efektif dalam menciptakan warga sekolah yang toleran dan menghargai perbedaan.

REFERENSI

- Adib, Noblana. "Kebijakan Tentang Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Non-Formal: Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Tahun 2011-2015." *SUSTAINABLE: Jurnal Kajian Mutu Pendidikan* 2, no. 1 (2019): 23-45. <https://doi.org/10.32923/kjmp.v2i1.980>.
- Ahmad, S. "Integrating religious moderation in school curriculum: A case study of Islamic education in Malaysia." *Journal of Education and Learning* 7, no. 1 (2018): 48-57.
- Alburaidi, Azza, dan Abdullah Ambusaidi. "The impact of using activities based on the Montessori approach in science in the academic achievement of fourth grade students." *International Journal of Instruction* 12, no. 2 (April 2019): 659-708. <https://doi.org/10.29333/iji.2019.12244a>.
- Apriani, Ni Wayan, dan Ni Komang Aryani. "Moderasi Beragama." *Kalangwan Jurnal Pendidikan Agama, Bahasa dan Sastra* 12, no. 1 (31 Maret 2022): 34-45. <https://doi.org/10.25078/kalangwan.v12i1.737>.
- Fahri Mohamad, Ahmad Zainur. "Moderasi Beragama di Indonesia." *Religions* 13, no. 5 (2022): 451. <https://doi.org/10.3390/rel13050451>.

⁴² Hasanah dan Sari, "Evaluasi pembelajaran agama Islam berbasis moderasi beragama di sekolah Dasar Negeri 14 Sawah Besar."

- Fitria, Y, dan R Saputra. "Pendidikan Multikultural dalam Mewujudkan Moderasi Beragama di Sekolah." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 1 (2018): 19–29.
- Hasanah, S, dan W. P Sari. "Evaluasi pembelajaran agama Islam berbasis moderasi beragama di sekolah Dasar Negeri 14 Sawah Besar." *Jurnal Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2021): 35–46.
- Hasyim, N, dan R Hartati. "Pembentukan klub moderasi sebagai sarana pendidikan karakter siswa di sekolah." *Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling* 4, no. 1 (2019): 57–62.
- Hefni, W. "Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri." *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (2020).
- Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik. *Panduan Penguatan Pendidikan Karakter Tahun 2019*. Jakarta: Kemendikbud, 2019.
- Indonesia, Kementrian Agama Republik. *Moderasi Beragama. Kalangwan Jurnal Pendidikan Agama, Bahasa dan Sastra*. Vol. 12, 2022. <https://doi.org/10.25078/kalangwan.v12i1.737>.
- Jamaluddin, Jamaluddin. "Implementasi Moderasi Beragama di Tengah Multikulturalitas Indonesia (Analisis Kebijakan Implementatif pada Kementerian Agama)." *AS-SALAM Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2022): 1–13.
- Juliet Corbin & Anselm Strauss. "Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory." *Canadian Journal of University Continuing Education* 36, no. 2 (2010): 463–65.
- Khoiriyah, U, dan S. N Fatah. "Pendidikan moderasi dalam membangun toleransi antarumat beragama." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 1 (2021): 16–29.
- Marfu'ah, Usfiyatul, Mubasyarah, Dian Adi Perdana, dan Afidatul Asmar. "Institusionalisasi Nilai Toleransi Di Perguruan Tinggi; Refleksi Atas Rumah Moderasi." Dalam *Prosiding Mukhtar Pemikiran Dosen Pmii*, 1:249–58, 2021.
- Michael Quinn, Patton author. *Qualitative research & evaluation methods : integrating theory and practice*. SAGE Publications Ltd STM, 2015.
- Mukhta, Martinis Yamin. *10 Kiat Sukses Mengajar di kelas*. Cet-3. Jakarta: PT. Nimas Multima, 2007.
- NU, Ma'arif. *Moderasi Beragama dalam Pendidikan*. Jakarta: Dewan Pendidikan Pusat, 2018.
- Purwati, R, dan E Sulistiawati. "Mengoptimalkan kerukunan antarumat beragama melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah." *Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2020): 53–68.
- Ramli, M. "Pendidikan karakter moderasi beragama sebagai solusi radikalisme di perguruan tinggi." Dalam *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 97–105. Sumatera Utara, 2018.
- RI, Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama. *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020.
- Rohman, Miftahur, Muhammad Akmansyah, dan Mukhibat Mukhibat. "Mainstreaming Strategies of Religious Moderation in Madrasah." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 22, no. 1 (2022): 95–118. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v22i1.3806>.
- Shihab, Najelaa. *Semua Murid Semua Guru Edukasi di masa Pandemi*. Tangerang Selatan: Literati, 2020.
- Sumarto, Sumarto. "Implementasi Program Moderasi Beragama Kementerian Agama Ri." *Jurnal Pendidikan Guru* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.47783/jurpendigu.v3i1.294>.
- Suryani, D. *Pendidikan multikultural: Modul pembelajaran toleransi agama dan budaya*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Sutrisno, Edy. "Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan." *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 2 (2019): 323–48. <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113>.
- Wijaya, Atika, Moh. Solehatul Mustofa, dan Fadly Husain. "Sosialisasi Program Merdeka Belajar dan Guru Penggerak Bagi Guru SMPN 2 Kabupaten Maros." *Jurnal Puruhita* 2,

no. 1 (2020): 46–50. <https://doi.org/10.15294/puruhita.v2i1.42325>.